



Manajemen Risiko Keselamatan Wisatawan pada Destinasi Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Ferdi Wardana¹, Mujahidin²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : ferdiwardana7@gmail.com¹, mujahidin@ipdn.ac.id²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tourist safety risk management, identify inhibiting factors, and formulate improvement efforts at the Marine Tourism Destination of Sasak Beach, West Pasaman Regency, West Sumatra Province. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Analysis refers to Hinsa Siahaan's risk management theory encompassing five dimensions: facilities/infrastructure, access, human resources, environment, and regulations. The results indicate that tourist safety risk management at Sasak Beach is not yet optimal across all dimensions. Safety facilities are inadequate, evacuation routes are prone to congestion, lifeguards lack professional certification, environmental management remains conventional, and existing SOPs do not specifically cover emergency procedures. The main inhibiting factors include limited infrastructure, low human resource capacity, suboptimal safety regulations and SOPs, minimal safety socialization to tourists, and weak inter-agency coordination. Necessary improvements include upgrading safety facilities, professional lifeguard certification, development of specific emergency SOPs, integration of early warning systems, and formalization of cross-agency coordination.

Keywords: : risk management; tourist safety; marine tourism; Sasak Beach; sustainable tourism

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan upaya peningkatan pada Objek Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori manajemen risiko Hinsa Siahaan yang mencakup lima dimensi: fasilitas/infrastruktur, akses, sumber daya manusia, lingkungan, dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Pantai Sasak belum optimal pada seluruh dimensi. Fasilitas keselamatan dalam kondisi tidak memadai, jalur evakuasi rawan kemacetan, penjaga pantai belum bersertifikasi profesional, pengelolaan lingkungan masih konvensional, serta SOP yang tersedia belum mencakup prosedur kedaruratan secara spesifik. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya regulasi dan SOP keselamatan, minimnya sosialisasi kepada wisatawan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Upaya peningkatan

yang diperlukan meliputi pembaruan fasilitas keselamatan, sertifikasi lifeguard profesional, penyusunan SOP kedaruratan khusus, pengintegrasian sistem peringatan dini, serta formalisasi koordinasi lintas instansi.

Kata Kunci: Manajemen risiko, keselamatan wisatawan, wisata bahari, Pantai Sasak, pariwisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari. Sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata menyumbang devisa negara hingga Rp280 triliun dengan wisata bahari sebagai kontributor utama (Pramadanu & Windasari, 2023). Namun peluang tersebut diiringi tantangan serius, khususnya pada aspek keselamatan wisatawan yang kerap mengikuti aktivitas berisiko tinggi seperti berenang, berselancar, dan menikmati wisata pantai lainnya (Taofiqurohman, 2021).

Secara global, International Life Saving Federation/ILS (2022) melaporkan lebih dari 236.000 kematian akibat tenggelam setiap tahun, dengan Asia Tenggara termasuk kawasan berisiko tinggi. WHO (2021) memperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 1.800 kasus tenggelam per tahun di wilayah bahari. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penerapan standar keselamatan di destinasi wisata. Regulasi terkait standar keselamatan wisatawan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tetapi implementasinya masih jauh dari optimal (Nurhamsyah, 2025). HelloSafe Travel Index (2025) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 sebagai negara tujuan liburan paling berbahaya di dunia.

Pantai Sasak di Kabupaten Pasaman Barat merupakan destinasi unggulan yang masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) 2019–2021. Data kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan signifikan dari 286.150 wisatawan pada 2021 menjadi 638.720 wisatawan pada 2024 (BPS Sumatera Barat, 2024). Namun pertumbuhan kunjungan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas keselamatan yang memadai. Data BPBD Pasaman Barat mencatat hanya tersedia 4 lifebuoy dan 1 pos jaga sementara, dengan 3 kasus kecelakaan (2022), 4 kasus (2023), dan 4 kasus (2024).

Kondisi tersebut menunjukkan paradoks antara potensi wisata unggulan dan lemahnya sistem keselamatan. Wilayah pesisir Kecamatan Sasak Ranah Pasisia dikategorikan rawan bencana, khususnya abrasi dan potensi tsunami (Marhamah et al., 2025), namun Pantai Sasak hingga saat ini belum memiliki unit penyelamat pantai resmi dan masih bergantung pada relawan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Pantai Sasak; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya; dan (3) merumuskan upaya peningkatan yang komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Pantai Sasak. Pendekatan ini dipilih karena fenomena

yang diteliti bersifat kontekstual dan memerlukan interpretasi makna dari berbagai perspektif aktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2016; Moleong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen resmi instansi terkait. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari: (1) Kepala BPBD Kabupaten Pasaman Barat; (2) Plt. Kepala Dinas Pariwisata; (3) Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata; (4) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata; (5) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata; (6) Pengelola Objek Wisata/Pokdarwis; (7) Petugas Keamanan; dan (8) lima orang wisatawan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan berdasarkan lima dimensi teori Siahaan; (2) observasi non-partisipan terhadap kondisi fasilitas dan aktivitas keselamatan di lokasi; dan (3) dokumentasi terhadap dokumen regulasi, SOP, dan data statistik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman & Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan Wisatawan Dimensi Fasilitas/Infrastruktur

Fasilitas informasi keselamatan di Pantai Sasak berupa papan imbauan dan rambu peringatan telah tersedia di titik-titik tertentu, namun kondisinya belum memadai. Sebagian besar rambu telah pudar akibat paparan cuaca pantai dan hanya ditempatkan di titik-titik tertentu tanpa sistem penyampaian informasi yang terstruktur. Hal ini menyebabkan wisatawan belum sepenuhnya memahami prosedur keselamatan yang berlaku.

Petugas keamanan pantai melaporkan hanya tersedia satu pos utama di dekat pintu masuk yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengawasan, dengan perlengkapan pertolongan pertama berupa kotak P3K standar dan beberapa pelampung dasar. Kondisi ini jauh dari standar yang direkomendasikan oleh ILS (2022). Data BPBD Pasaman Barat (2024) mengonfirmasi hanya tersedia 4 lifebuoy untuk kawasan pantai yang dikunjungi hingga 52.000 wisatawan per tahun.

Hasil observasi menemukan bahwa petunjuk titik kumpul telah dipasang, namun lokasinya belum optimal dan tidak dilengkapi penjelasan prosedur evakuasi yang mudah dipahami. Wisatawan yang diwawancarai mayoritas menyatakan tidak mengetahui keberadaan titik kumpul tersebut. Temuan ini sejalan dengan Wijaya et al. (2023) yang menyatakan bahwa fasilitas keselamatan yang tidak informatif sama nilainya dengan tidak adanya fasilitas.

Dimensi Akses

Jalur akses di kawasan Pantai Sasak berupa jalan aspal yang menghubungkan area masuk hingga lokasi utama wisata. Namun fungsinya sebagai jalur evakuasi darurat belum optimal karena terdapat potensi kemacetan

yang signifikan saat kunjungan puncak. Informan dari Pokdarwis mengungkapkan bahwa pada hari libur besar, jalur akses sering mengalami gridlock yang berpotensi menghambat evakuasi darurat.

Minimnya penerangan jalan pada malam hari menambah risiko keselamatan wisatawan, terutama yang berkunjung hingga larut malam. Beberapa titik jalan yang berdekatan dengan aliran sungai atau muara juga dikategorikan rawan. Kondisi ini memerlukan manajemen lalu lintas kawasan wisata yang lebih terstruktur, terutama pada periode kunjungan puncak.

Dimensi Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia keselamatan di Pantai Sasak merupakan dimensi dengan kondisi paling kritis. Sebagian besar petugas merupakan pemuda lokal yang berlatih secara otodidak tanpa memiliki sertifikasi lifeguard profesional dari lembaga yang diakui seperti Basarnas atau PRSI. Jumlah personel sekitar 5-8 orang untuk area pantai yang dikunjungi puluhan ribu wisatawan sangat tidak proporsional dengan rasio standar minimal 1 penjaga per 100 wisatawan yang direkomendasikan ILS (2022).

Belum adanya pelatihan formal dan standar kompetensi mengakibatkan kemampuan penanganan kondisi darurat tidak terstandarisasi. Fungsi petugas juga masih bercampur antara tugas retribusi, kebersihan, dan keamanan, sehingga pengawasan keselamatan tidak dapat dilakukan secara fokus dan optimal.

Dimensi Lingkungan

Pengelolaan lingkungan kawasan wisata dilakukan melalui kerja sama antara pengelola dan Dinas Lingkungan Hidup dengan pengangkutan sampah secara rutin. Namun sistem pengelolaan masih bersifat konvensional: sampah dikumpulkan dan diangkut ke TPA tanpa pemilahan organik-anorganik. Tingkat kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan juga masih rendah, dan belum ada mekanisme edukasi atau insentif yang mendorong partisipasi aktif wisatawan.

Dari sisi mitigasi bencana lingkungan, kawasan pesisir Sasak Ranah Pasisia dikategorikan rawan abrasi dan tsunami (Marhamah et al., 2025). Vegetasi pantai dan pohon-pohon besar di kawasan wisata belum mendapatkan pemeliharaan berkala yang memadai, sehingga berpotensi menjadi sumber risiko tambahan saat cuaca ekstrem.

Dimensi Peraturan

Regulasi pengelolaan Pantai Sasak mengacu pada Peraturan Daerah Pariwisata yang mencakup aspek keamanan secara umum. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan wisata sudah tersedia, namun masih bersifat generik dan belum memuat prosedur spesifik untuk penanganan kedaruratan di kawasan wisata pantai, seperti prosedur penanganan korban tenggelam, evakuasi tsunami, atau penanganan kondisi cuaca ekstrem.

Ketiadaan SOP kedaruratan yang spesifik menyebabkan respons terhadap situasi darurat masih bergantung pada inisiatif perorangan dan bersifat situasional.

Koordinasi antara Dinas Pariwisata, BPBD, kepolisian, dan pengelola wisata belum terinstitusionalisasi secara formal melalui protokol atau nota kesepahaman yang mengikat.

Tabel 1. Matriks Penerapan Manajemen Risiko Keselamatan Wisatawan Pantai Sasak

Dimensi	Kondisi Eksisting	Status
Fasilitas/Infrastruktur	Rambu peringatan pudar, 4 lifebuoy untuk 52.000 wisatawan/tahun, 1 pos jaga sementara	Belum Optimal
Akses	Jalan aspal tersedia namun rawan kemacetan saat puncak kunjungan, minim penerangan malam	Belum Optimal
Sumber Daya Manusia	5-8 petugas tanpa sertifikasi lifeguard, merangkap tugas retribusi dan kebersihan	Belum Optimal
Lingkungan	Pengelolaan sampah konvensional, belum ada pemilahan, vegetasi belum terpelihara	Belum Optimal
Peraturan/SOP	SOP umum tersedia namun tidak memuat prosedur kedaruratan spesifik	Belum Optimal

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan observasi, 2025

Faktor Penghambat Manajemen Risiko Keselamatan

Terdapat lima faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas keselamatan yang ditandai dengan kondisi rambu peringatan yang pudar, minimnya peralatan pertolongan pertama, serta tidak tersedianya sistem peringatan dini yang terintegrasi di level destinasi. Sektor pariwisata Pasaman Barat hanya menyumbang sekitar Rp350 juta per tahun terhadap PAD (BPS, 2022), yang berimplikasi pada minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur keselamatan.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia tercermin dari sedikitnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan volume kunjungan dan tidak adanya sertifikasi profesional. Kondisi ini berbeda dengan destinasi populer seperti Bali yang sudah memiliki standar kompetensi lifeguard yang terstandarisasi (Hamzar, 2025). Ketiga, belum optimalnya regulasi dan SOP keselamatan karena SOP yang ada belum mencakup prosedur kedaruratan spesifik. Keempat, minimnya sosialisasi keselamatan menyebabkan wisatawan tidak memperoleh informasi prosedur darurat yang memadai sejak memasuki kawasan. Kelima, lemahnya

koordinasi antarlembaga antara Dinas Pariwisata, BPBD, kepolisian, dan pengelola masih bersifat situasional.

Upaya Peningkatan Manajemen Risiko Keselamatan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting dan faktor penghambat, penelitian ini merumuskan enam klaster upaya peningkatan yang perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral.

Pertama, peningkatan fasilitas dan infrastruktur keselamatan, meliputi pembaruan rambu peringatan dengan material tahan cuaca, penambahan lifebuoy di titik-titik rawan, pemasangan Early Warning System (EWS) yang terintegrasi dengan BPBD, serta penyediaan papan informasi digital yang menampilkan kondisi cuaca dan ombak secara real-time. Nurhamsyah (2025) membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi geografis dan simulasi penanganan korban tenggelam mampu menekan potensi kecelakaan secara signifikan.

Kedua, optimalisasi akses dan jalur evakuasi melalui penerapan skema manajemen parkir terstruktur, penandaan jalur evakuasi khusus, penambahan penerangan jalan, serta penetapan kapasitas maksimum pengunjung harian berdasarkan kajian daya tampung kawasan. Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui sertifikasi lifeguard profesional dari Basarnas atau PRSI, penambahan personel dengan rasio minimal 1 penjaga per 100 wisatawan, pemisahan fungsi antara petugas retribusi dan penjaga keselamatan, serta pelatihan tanggap darurat berkala.

Keempat, peningkatan pengelolaan lingkungan melalui implementasi sistem pemilahan sampah terpadu, pemeliharaan vegetasi pantai berkala, dan penerapan program edukasi lingkungan kepada wisatawan. Kelima, penguatan regulasi dan SOP melalui penyusunan SOP kedaruratan spesifik yang mencakup prosedur penanganan korban tenggelam, evakuasi tsunami, dan cuaca ekstrem; serta revisi Perda Pariwisata untuk memasukkan klausul standar minimum keselamatan. Keenam, pembentukan Tim Keselamatan Wisata Terpadu yang diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antarlembaga dengan pertemuan koordinasi minimal setiap tiga bulan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah nagari dan seluruh relawan kelompok sadar wisata sasak ranah pasisia atas kesediaan dan keterbukaan dalam memberikan informasi selama penelitian. Terima kasih pula kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

SIMPULAN

Penerapan manajemen risiko keselamatan wisatawan di Objek Wisata Bahari Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada seluruh dimensi teori Hinsa Siahaan. Fasilitas keselamatan dalam kondisi tidak memadai, kapasitas SDM sangat terbatas, jalur evakuasi berpotensi terhambat kemacetan, pengelolaan lingkungan masih konvensional, dan SOP belum

mencakup prosedur kedaruratan spesifik. Lima faktor penghambat yang teridentifikasi bersifat saling berkaitan: keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas SDM, lemahnya regulasi dan SOP, minimnya sosialisasi kepada wisatawan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Upaya peningkatan yang diperlukan mencakup pembaruan fasilitas, sertifikasi profesional lifeguard, penyusunan SOP kedaruratan, integrasi sistem peringatan dini, sosialisasi sistematis, dan formalisasi koordinasi lintas instansi. Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, BPBD, pengelola wisata, dan masyarakat lokal menjadi prasyarat untuk mewujudkan keselamatan wisatawan yang berkelanjutan di Pantai Sasak.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrian, F., Rifardi, R., & Elizal, E. (2022). Analysis of Suitability and Supporting Capacity of Sasak Beach Tourism Pasaman Barat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 27(1), 74–81. <https://doi.org/10.31258/jpk.27.1.74-81>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fitriani, V. A., & Alfidaus, L. K. (2024). Tata kelola keselamatan dan keamanan pada sektor pariwisata: Studi Wisata Dieng. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 654–666.
- Hamzar, D. (2025). *Permintaan Jasa Wisata dan Safety di Indonesia (Studi Kasus Bali)*. Jakarta: Basarnas.
- Hidayat, A. M., & Rostyaningsih, D. (2024). Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Bandengan Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 885–902.
- International Life Saving Federation. (2022). *World Drowning Prevention Report 2022*. Brussels: ILS.
- ISO. (2018). *ISO 31000:2018 - Risk management - Guidelines*. Geneva: International Organization for Standardization.
- Iskandar, M. I., et al. (2025). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Ekonomi dan Budaya Lokal. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5778–5782.
- Marhamah, I. (2025). Analisis dan mitigasi risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi pantai di Pantai Muaro Sasak Kabupaten Pasaman Barat. [Laporan Penelitian].
- Megantara, A. A., & Zahran, M. F. R. (2024). Penerapan manajemen risiko pada destinasi wisata Sungai Palayangan Cileunca, Kabupaten Bandung. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 4(2), 72–80.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhamsyah, M. (2025). *Manajemen risiko keselamatan wisatawan berbasis teknologi informasi geografis*. [Kajian Teknis]. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Pramadanu, A., & Windasari, N. A. (2023). Strategi pemulihan pariwisata bahari pasca-pandemi Covid-19. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 7(1), 1–15.

- Ritchie, B., & Crouch, G. (2011). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Wallingford: CABI Publishing.
- Siahaan, H. (2009). *Manajemen Risiko pada Perusahaan & Birokrasi (Cetakan revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Taofiqurohman, A. (2021). Factors Causing Maritime Tourism Risk Based on Physical Dynamics of Beaches on the South Coast of West Java. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 47–59.
- UNWTO. (2019). *Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations*. Madrid: UNWTO.
- WHO. (2021). *Drowning Prevention: A Global Challenge*. Geneva: World Health Organization.
- Wijaya, O., Pambudi, D. I., & Makarim, D. (2024). Manajemen risiko keselamatan, kesehatan, dan keamanan di kawasan wisata Pantai Parangtritis. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 9(1). <https://doi.org/10.21111/jihoh.v9i1.11952>
- Wijaya, I. B. O., Suryawan, I. B., & Budiarta, I. G. (2023). Manajemen risiko keselamatan dan keamanan wisatawan di destinasi wisata bahari. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 18(2), 123–134